



Peran Pemerintah Desa dalam Pelestarian Budaya di Desa Bagolo Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran

Andini^{1*}, Asep Nurwanda², Regi Refian Garis³

¹⁻³ Universitas Galuh, Indonesia

Alamat: Jl. R. E. Martadinata No. 150 Ciamis, 46274 Jawa Barat

Korespondensi penulis: andini02@student.unigal.ac.id*

Abstract. *This research is motivated by the suboptimal role of the Village Government in preserving culture in Bagolo Village, Kalipucang District, Pangandaran Regency. The research method used is a descriptive method with a qualitative research approach. The data sources of this research are primary and secondary data. The primary data of this research is the result of interviews with 7 informants. The secondary data of this research are important documents relevant to the research. The data collection techniques of this research consist of observation, interviews and documentation. The data analysis of this research is data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the role of the Bagolo Village Government in preserving culture has not been optimal, as seen from five dimensions. 1). In the stabilizer dimension, cultural preservation planning is not optimal and there is minimal community involvement in the planning process. 2). In the innovator dimension, there is low technology-based innovation and limited resources to develop creative preservation methods. 3). In the modernizer dimension, there is a lack of use of modern technology for cultural promotion and documentation in order to attract the interest of the younger generation. 4). In the pioneer dimension, there is a lack of consistent community mobilization programs and arts groups to preserve culture. 5). In the implementation dimension, there are budget limitations, facilities and infrastructure, and lack of access to capital for artists. The results of this study indicate that efforts to preserve culture in Bagolo Village require strengthening collaboration between the village government and the community, optimizing the use of technology, adequate funding support, and planned and sustainable preservation strategies so that local culture remains sustainable amidst the flow of modernization.*

Keywords: *Bagolo Village, Cultural Preservation, Local Wisdom, The Role of Village Government*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya Peran Pemerintah Desa Dalam Pelestarian Budaya Yang Ada Di Desa Bagolo Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer penelitian ini adalah hasil wawancara dari 7 informan. Data skunder penelitian ini adalah dokumen-dokumen penting yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Desa Bagolo dalam pelestarian budaya belum berjalan optimal, terlihat dari lima dimensi. 1). Pada dimensi stabilisator, belum optimalnya perencanaan pelestarian budaya serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan. 2). Pada dimensi inovator, rendahnya inovasi berbasis teknologi dan terbatasnya sumber daya untuk mengembangkan metode pelestarian yang kreatif. 3). Pada dimensi modernisator, kurangnya pemanfaatan teknologi modern untuk promosi dan dokumentasi budaya agar dapat menarik minat generasi muda. 4). Pada dimensi pelopor, minimnya program penggerakan masyarakat dan kelompok seni yang konsisten untuk melestarikan budaya. 5). Pada dimensi pelaksana, keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana, serta kurangnya akses permodalan bagi pelaku seni. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian budaya di Desa Bagolo memerlukan penguatan kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat, optimalisasi pemanfaatan teknologi, dukungan pendanaan yang memadai, serta strategi pelestarian yang terencana dan berkelanjutan agar budaya lokal tetap lestari di tengah arus modernisasi.

Kata kunci: Desa Bagolo, Kearifan Lokal, Pelestarian Budaya, Peran Pemerintah Desa,

1. LATAR BELAKANG

Dalam membangun suatu desa, kearifan lokal menjadi suatu hal yang sangat penting dalam pembangunan desa sehingga diperlukan kesadaran dan partisipasi pemerintah dan masyarakat, sesuai dengan otonomi desa dimana semua wewenang dan kewajiban diberikan kepada desa untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Salah satunya mengenai Kebudayaan, Desa Bagolo merupakan salah satu desa yang masih mempertahankan nilai-nilai budaya lokal sebagai bagian penting dari identitas masyarakat. Beberapa budaya lokal yang ada seperti Upacara Adat Hajat Laut, Upacara Adat Hajat Bumi, Pencak Silat, dan lainnya.

Dalam era globalisasi dan modernisasi yang terus berkembang, keberadaan budaya tradisional menjadi tantangan tersendiri karena berisiko tergerus oleh perubahan zaman. Oleh karena itu, pelestarian budaya menjadi tanggung jawab bersama, khususnya pemerintah desa dan masyarakat. Berbagai bentuk budaya yang masih hidup dan dipraktikkan di Desa Bagolo menunjukkan kekayaan warisan leluhur yang bernilai tinggi. Di antaranya adalah upacara adat Hajat Laut yang dilaksanakan sebagai ungkapan syukur para nelayan atas hasil laut, serta upacara adat Hajat Bumi sebagai bentuk penghormatan kepada alam dan rasa syukur atas hasil panen. Selain itu, terdapat pula kesenian pencak silat yang tidak hanya berfungsi sebagai bela diri, tetapi juga sebagai pembentukan karakter dan pelestarian nilai-nilai moral.

Agar budaya-budaya tersebut tidak punah dan tetap terjaga keberadaannya di tengah arus modernisasi yang semakin kuat, perlu adanya dukungan nyata dari berbagai pihak, yang mencakup upaya dokumentasi yang sistematis, pembinaan yang berkelanjutan, serta pelibatan aktif generasi muda dalam setiap kegiatan budaya. Dukungan ini sangat penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai, tradisi, dan kearifan lokal yang terkandung dalam budaya tersebut dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan komprehensif mengenai bentuk-bentuk budaya yang masih lestari di Desa Bagolo, maka disajikan data dalam bentuk tabel berikut.

Tabel 1. Jenis Budaya yang Masih Dilestarikan di Desa Bagolo

No	Jenis Budaya	Kategori	Waktu Pelaksanaan	Fungsi Budaya
1.	Upacara Adat Hajat Laut	Upacara Tradisional	Setiap Tahun (Pada Bulan Tertentu)	Ungkapan syukur atas hasil laut, dan memohon keselamatan nelayan.
2.	Upacara Adat Hajat Bumi	Upacara Tradisional	Setiap Tahun (Pada Saat Musim Panen)	Rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen dan tanah yang subur.

3.	Pencak Silat	Kesenian Bela Diri	Latihan Rutin dan saat ada acara Desa	Melestarikan seni tradisional dan nilai moral.
----	--------------	--------------------	---------------------------------------	--

Sumber : Hasil Penelitian

Di era globalisasi dan modernisasi, kemajuan teknologi memungkinkan masyarakat mengakses informasi dengan cepat. Namun, pengaruh globalisasi ini juga berdampak pada budaya lokal, di mana akulturasi dengan budaya luar menyebabkan melemahnya nilai-nilai budaya bangsa. Hal ini menjadi tantangan besar untuk mempertahankan kearifan lokal, terutama di desa-desa. Pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya tersebut.

Kendala dalam pelestarian budaya tidak hanya dihadapi oleh masyarakat, tetapi juga oleh pemerintah. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya minat generasi muda untuk memainkan alat musik tradisional, menari, atau menyanyikan lagu-lagu daerah. Kebiasaan ini tergantikan oleh musik modern, dan ada rasa malu di kalangan generasi muda terhadap kesenian yang dianggap ketinggalan zaman. Jika tidak ada regenerasi budaya lokal, upaya pemerintah untuk melestarikan budaya akan sia-sia.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, bahwa untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia, diperlukan langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan. Sudah sangat jelas juga dalam penjelasan Undang-Undang diatas bahwa untuk memajukan dan melestarikan budaya lokal, pemerintah perlu mengambil langkah strategis dalam melindungi, mengembangkan, dan membina masyarakat agar kesenian tradisional dapat berkembang. Pelestarian budaya adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki strategi yang baik untuk mendukung dan mewadahi kegiatan budaya. Sangat disayangkan jika semangat masyarakat dalam melestarikan kesenian tradisional tidak didukung oleh pemerintah.

Peran Pemerintah Desa tidak hanya dalam melestarikan kesenian tradisional, tetapi juga sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana. Masyarakat membutuhkan bantuan pemerintah untuk menjaga kesenian tradisional, yang merupakan warisan dan kekayaan Indonesia. Penting untuk melestarikan kebudayaan di desa agar kesenian tradisional tidak hilang. Mendukung dan mewadahi kegiatan budaya adalah tugas pemerintah desa sebagai wakil rakyat. Pemerintah desa juga harus mengelola dan membina masyarakat untuk menghindari masalah yang mungkin timbul, sehingga peran mereka dapat dijalankan dengan

efektif. Desa Bagolo, yang memiliki potensi wisata budaya, perlu melakukan pembinaan agar masyarakat menghargai budaya daerah dan hidup berdampingan dengan baik tanpa kesenjangan sosial antar kelompok.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Pemerintah Desa dalam pelestarian budaya yang ada di Desa Bagolo belum optimal hal tersebut disebabkan oleh adanya indikator permasalahan antara lain: 1) Belum adanya regulasi yang mengatur tentang pelestarian budaya di Desa Bagolo Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran. 2) Peran pemerintah desa kurang memfasilitasi dan memberikan modal dalam menyediakan sarana dan prasarana terhadap pelaku seni di desa untuk pelestarian budaya. 3) Belum adanya kesadaran masyarakat dalam partisipasi pelestarian budaya yang ada di Desa Bagolo Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai permasalahan tersebut dan menuangkannya ke dalam bentuk artikel jurnal yang berjudul: **“Peran Pemerintah Desa Dalam Pelestarian Budaya di Desa Bagolo Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran”**.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Peran

Peran adalah suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan dari jabatan tersebut. Setiap manusia dalam kehidupannya memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan perannya setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda, hal ini dipengaruhi oleh latar belakang sosialnya. Dengan demikian, peran tidak hanya mencerminkan tanggung jawab, tetapi juga bagaimana individu berinteraksi dengan lingkungan sosialnya.

Peran juga dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. (Asep Nurwanda, 2025).

Sedangkan menurut Garis, R.R. (2022) menyatakan bahwa “Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran”.

Adapun menurut Soekanto (2015:3) menyatakan bahwa: “Peran merupakan suatu unsur aspek yang dinamis dalam kedudukan statusnya terhadap sesuatu. Apabila Seseorang individu

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan dan statusnya, maka seseorang itu menjalankan suatu peran”.”.

Selanjutnya, menurut Siagian, Sondang P. (2017: 142-150) “Peran merupakan seperangkat perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya”. Terdapat lima peran pemerintah menurut Siagian antara lain adalah: 1)Peran Selaku Stabilisator, 2)Peran Selaku Inovator, 3)Peran selaku Modernisator, 4)Peran Selaku Pelopor, dan 5)Peran Selaku Pelaksana.

Secara keseluruhan, peran merupakan suatu rangkaian perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh individu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kedudukan dan status sosialnya

Peran Pemerintah Desa dalam Pelestarian Budaya

Peran pemerintah desa sangat penting dalam konteks pelestarian budaya, di mana pemerintah desa berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan kebijakan yang ada. Menurut Siagian, Sondang P. (2017:132), "Peranan pemerintah pada umumnya muncul dalam berbagai bentuk seperti fungsi pengaturan, fungsi perumusan berbagai jenis kebijaksanaan, fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum, serta fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan". Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya bertanggung jawab dalam hal administrasi, tetapi juga dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat.

Pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelestarian budaya lokal. Menurut Soetomo (2006), peran pemerintah desa dalam pelestarian budaya sangat penting dan dapat dilihat dalam berbagai aspek. Soetomo menekankan bahwa pemerintah desa harus berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan budaya lokal dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Dalam hal ini, pemerintah desa bertugas untuk membangkitkan semangat masyarakat agar terlibat dalam kegiatan budaya seperti upacara adat, seni tradisional, atau festival lokal.

Pemerintah desa dapat menyediakan dukungan berupa fasilitas dan sumber daya untuk menyelenggarakan kegiatan budaya. Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan budaya, pemerintah desa dapat memastikan bahwa pelestarian budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kebanggaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Talidzu Ndraha (2011) yang menyatakan bahwa: “Peranan pemerintah adalah proses pemenuhan kebutuhan pihak yang

diperintah akan jasa publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan civil kepada setiap orang pada saat diperlukan sehingga menimbulkan hubungan transaksional”.

Dengan demikian, peran pemerintah desa dalam pelestarian budaya tidak hanya terbatas pada pengaturan dan penyelenggaraan, tetapi juga mencakup pemberdayaan masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam menjaga dan mengembangkan budaya lokal. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa budaya yang ada dapat bertahan dan berkembang seiring dengan perubahan zaman, serta memberikan kontribusi positif terhadap identitas dan keberagaman masyarakat.

Budaya dan Kebudayaan

Budaya merupakan suatu cara hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi dan dimiliki oleh sekelompok orang. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit di antaranya adalah bahasa, adat istiadat, sistem agama, politik, pakaian, bangunan, perkakas, dan karya seni. Menurut Nurul Iman (2016:15) mengemukakan bahwa “Budaya adalah sebuah produk yang menjadi karakteristik khas yang berasal dari masa lampau berupa nilai-nilai yang berubah menjadi serta dipergunakan pada kehidupan masyarakat oleh suatu grup atau keluarga pada suatu bangsa”.

Kebudayaan menurut Edward B. Taylor (Nuraeni dan Alfian, 2012:17), adalah suatu konsep holistik yang kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, norma, proses, konvensi, serta kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia untuk bergabung dengan masyarakat.

Sedangkan budaya menurut Koentjaraningrat (2005:4) adalah “Budaya sebagai wujud yang mencakup keseluruhan dari gagasan, kelakuan dan hasil-hasil kelakuan. Sehingga dapat dilihat bahwa segala sesuatu yang ada dalam pikiran manusia yang dilakukan dan dihasilkan oleh kelakuan manusia adalah kebudayaan”.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebudayaan atau budaya merupakan sistem yang kompleks dan terbentuk dari perilaku maupun pikiran yang berkaitan dengan kebiasaan, adanya gerak masyarakat, dan pergerakan ini menghasilkan sebuah sistem tersendiri dalam kumpulan masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai Peran Pemerintah Desa Dalam Pelestarian Budaya Di Desa Bagolo Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini mencakup observasi, wawancara dan

dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data yang sifatnya primer dan sumber data yang bersifat sekunder. Data primer diperoleh melalui proses wawancara secara mendalam antara peneliti dan informan terpilih sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen (resmi dan tidak resmi) seperti buku, perundang – undangan, berbagai media dan profil lokasi penelitian yang memiliki keterkaitan dengan masalah dalam penelitian. Adapun aktifitas analisis data yang dilakukan yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan serta verifikasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian mengenai Peran Pemerintah Desa Dalam Pelestarian Budaya di Desa Bagolo Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran menggunakan teori menurut Siagian, Sondang P. (2017: 142-150), yang menyatakan bahwa terdapat lima peran pemerintah antara lain adalah: 1)Peran Selaku Stabilisator, 2)Peran Selaku Inovator, 3)Peran selaku Modernisator, 4)Peran Selaku Pelopor, dan 5)Peran Selaku Pelaksana.

Selanjutnya penulis dapat memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan dengan wawancara dan observasi yang berfokus mengenai Peran Pemerintah Desa Dalam Pelestarian Budaya di Desa Bagolo Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran.

Peran Selaku Stabilisator

Stabilisator dalam peran pemerintah artinya mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. peran tersebut bisa terwujud dengan menggunakan berbagai cara diantaranya, kemampuan selektif yang tinggi proses sosialisasi yang elegan namun efektif, melalui edukasi, pendekatan yang persuasive serta pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan.

Pada dimensi Stabilisator, Peran Pemerintah Desa Dalam Pelestarian Budaya di Desa Bagolo Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran belum sepenuhnya berjalan optimal. Adapun hambatan yang dihadapi meliputi kurangnya koordinasi dengan pelaku seni, masyarakat, dan generasi muda dalam melakukan perencanaan pelestarian budaya. Kondisi ini menyebabkan perencanaan pelestarian budaya yang ada di desa diketahui secara terbatas dan tidak terarah, sehingga berdampak pada rendahnya partisipasi dan minat generasi muda dalam mempelajari budaya lokal. Selain itu, perencanaan kegiatan sosialisasi juga kurang karena seringkali terkendala waktu untuk kegiatan yang lain.

Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, perlu mengadakan musyawarah dengan seluruh lapisan masyarakat untuk perencanaan budaya. Pemerintah desa juga harus melibatkan pelaku seni, tokoh adat, dan generasi muda dalam perencanaan. Selain itu, sosialisasi mengenai pelestarian budaya perlu ditingkatkan, termasuk mengajak generasi muda dan bekerja sama dengan tokoh adat serta pelaku seni. Melibatkan pelaku seni dalam acara desa juga penting untuk memperkenalkan budaya lebih luas dan meningkatkan partisipasi.

Peran selaku Inovator

Inovator, merupakan salah satu dari hasil sebuah kreativitas. Pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Jadi prakondisi yang wajib terpenuhi agar efektif memainkan peranannya pemerintah perlu mempunyai tingkat keabsahan (legitimacy) yang tinggi. Suatu pemerintahan yang tingkat keabsahannya rendah, misalnya sebab “menang” pada perebutan kekuasaan atau karena melalui pemilihan awam yang tidak amanah serta tidak adil, akan sulit menyodorkan inovasinya pada masyarakat.

Pada dimensi Inovator, Peran Pemerintah Desa Dalam Pelestarian Budaya di Desa Bagolo Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran belum sepenuhnya berjalan optimal. Adapun hambatan yang dihadapi meliputi kurangnya perhatian terhadap pengembangan keterampilan seni secara rutin dan minimnya regenerasi pelaku seni. Selain itu, pengembangan budaya secara menyeluruh belum maksimal karena kegiatan budaya belum rutin dan fasilitas masih terbatas. Keterbatasan sumber daya manusia, terutama anak muda yang kurang tertarik terhadap budaya lokal, serta keterbatasan teknologi, sarana prasarana, dan pemahaman tentang inovasi juga menjadi kendala. Minimnya fasilitas pendukung seperti alat dokumentasi dan kurangnya pemahaman serta pemanfaatan teknologi juga menjadi hambatan.

Upaya yang diperlukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah meningkatkan pengenalan dan partisipasi masyarakat, terutama generasi muda, dalam kegiatan budaya. Pemerintah desa perlu menyediakan pelatihan bagi pelaku seni, lebih sering melibatkan mereka dalam acara desa, dan memanfaatkan media digital untuk dokumentasi serta promosi budaya. Selain itu, penting untuk menjalin kerja sama dengan pihak luar guna mendapatkan ide dan dukungan inovasi..

Peran selaku Modernisator

Modernisator, dalam mewujudkan pembangunan modernisator pada tiap negara diperlukan antara lain ilmu pengetahuan yang cukup, kemampuan dan kehandalan manajerial, kemampuan mengolah sumber daya alam yang dimiliki sebagai nilai tambah yang tinggi,

memiliki sistem pendidikan yang handal yang dapat menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki pemikiran yang produktif, dasar kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki arah tujuan yang jelas tentang masa depan sesuai yang diinginkan sehingga dapat terwujud dimasa depan. Selaku Modernisator, bahwa pemerintah bertindak untuk mengantarkan rakyat yang sedang membangun menuju modernisasi dan meninggalkan cara serta gaya hidup tradisional yang sudah tidak sesuai lagi.

Pada dimensi Modernisator, Peran Pemerintah Desa dalam Pelestarian Budaya di Desa Bagolo Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran belum sepenuhnya berjalan optimal. Adapun hambatan yang dihadapi meliputi kurangnya pemahaman pemerintah desa dan pemanfaatan teknologi digital untuk promosi, minimnya partisipasi dan minat generasi muda terhadap budaya lokal, keterbatasan fasilitas dan dokumentasi yang menyebabkan banyak acara budaya tidak terekam, serta kurangnya kesadaran masyarakat dan pemerintah akan pentingnya pelestarian. Selain itu, berkurangnya pengetahuan adat di kalangan generasi muda dan pandangan bahwa budaya bukan prioritas juga menjadi kendala.

Upaya yang untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan memanfaatkan teknologi untuk dokumentasi dan promosi budaya melalui media sosial, meningkatkan pemahaman dan pelatihan bagi aparat desa dan masyarakat, serta secara aktif melibatkan generasi muda seperti karang taruna dalam kegiatan budaya. Penting juga untuk melakukan sosialisasi yang konsisten mengenai nilai penting budaya lokal agar masyarakat mendukung pelestarian dan tradisi yang hampir hilang dapat dihidupkan kembali melalui dokumentasi digital.

Peran selaku Pelopor

Pemerintah selaku pelopor tidak hanya menjalankan fungsi selaku perumus kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan saja, tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan yang inovatif yang mampu memecahkan berbagai tantangan dan keterbatasan yang ada. Selaku pelopor pemerintah harus Menjadi panutan (role model) bagi seluruh masyarakat. Peran pemerintah sebagai pelopor dalam pembangunan yaitu pemerintah turun langsung ke lokasi tanpa perantara atau tanpa media yang menghubungkan, dan pemerintah langsung menjadi motivator dalam program kerja, pemberi bimbingan dan arahan bagi masyarakat.

Pada dimensi Pelopor, Peran Pemerintah Desa dalam Pelestarian Budaya di Desa Bagolo Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran belum sepenuhnya berjalan optimal. Adapun hambatan yang dihadapi adalah kurangnya komitmen nyata dari pemerintah desa yang masih sebatas mendukung kegiatan inisiatif masyarakat, tokoh adat, dan pelaku

seni, alih-alih menjadi penggerak utama. Selain itu, Rendahnya partisipasi generasi muda dan kesulitan mencari anggota baru untuk kelompok seni serta minimnya Alokasi Dana Desa untuk kegiatan budaya juga menjadi hambatan.

Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan meningkatkan komitmen dan peran aktif pemerintah desa dari sekadar pendukung menjadi penggerak utama, menyediakan anggaran khusus untuk kegiatan pelestarian budaya, dan secara aktif melibatkan generasi muda untuk mendorong regenerasi pelestari budaya. Pemerintah juga perlu membuat dokumentasi dan mempublikasikan kegiatan budaya melalui media sosial untuk menarik perhatian dan meningkatkan partisipasi, serta memperkuat kerja sama antara pemerintah desa, masyarakat, dan pelaku seni.

Peran selaku Pelaksana

Pelaksana, merupakan pemegang tanggung jawab kegiatan pembangunan nasional dan bukan menjadi beban pemerintah saja, karena terdapat pertimbangan seperti keselamatan negara. Sebagai pelaksana pemerintah harus dapat memperhitungkan faktor-faktor yang berpengaruh dalam pembangunan nasional. Mengendalikan faktor negatif yang dapat menjadi penghalang dalam pembangunan nasional sehingga dampaknya dapat diminimalkan, dan dapat mengetahui faktor-faktor yang bisa mendorong laju pembangunan nasional sehingga dapat menarik manfaat yang besar.

Pada dimensi Pelaksana, Peran Pemerintah Desa dalam Pelestarian Budaya di Desa Bagolo Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran belum sepenuhnya berjalan optimal. Adapun hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran desa yang lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan fisik, kurangnya sarana dan prasarana khusus untuk kegiatan budaya seperti sanggar seni atau gudang penyimpanan alat, serta minimnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang seni dan budaya. Rendahnya partisipasi masyarakat dan minat generasi muda akibat kurangnya sosialisasi dan pendampingan, serta fasilitasi yang bersifat insidental (hanya saat acara tertentu), juga menjadi kendala. Selain itu, belum adanya program khusus permodalan dari desa bagi pelaku seni, sehingga mereka kesulitan mendapatkan modal dan kegiatan budaya seringkali tidak berkelanjutan.

Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan meningkatkan fasilitas dan sarana prasarana yang memadai dan khusus untuk kegiatan budaya, mengalokasikan anggaran yang jelas dan memadai, serta mencari kerja sama dengan pihak luar untuk pendanaan tambahan. Pemerintah desa juga perlu mengembangkan program pendampingan yang berkelanjutan dan rutin, serta menyediakan akses permodalan yang lebih mudah bagi pelaku

seni, baik melalui program desa sendiri, koperasi budaya, maupun kerja sama dengan pihak ketiga.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Pemerintah Desa dalam Pelestarian Budaya di Desa Bagolo Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam lima dimensi diantaranya: Stabilisator, Inovator, Modernisator, Pelopor, dan Pelaksana belum sepenuhnya berjalan optimal. Hambatan yang dihadapi mencakup kurangnya koordinasi dengan pelaku seni dan masyarakat, minimnya perhatian terhadap pengembangan keterampilan seni, keterbatasan fasilitas dan teknologi, serta rendahnya partisipasi generasi muda. Selain itu, komitmen pemerintah desa yang masih sebatas mendukung inisiatif masyarakat dan ketidakcukupan anggaran untuk kegiatan budaya juga menjadi kendala signifikan.

Upaya yang diperlukan untuk mengatasi hambatan ini meliputi peningkatan sosialisasi dan partisipasi masyarakat, penyediaan pelatihan bagi pelaku seni, pengalokasian anggaran yang jelas untuk kegiatan budaya, serta pengembangan program pendampingan yang berkelanjutan. Penelitian ini juga menunjukkan perlunya kerja sama yang lebih erat antara pemerintah desa, tokoh adat, pelaku seni, dan generasi muda untuk memastikan pelestarian budaya dapat berjalan secara efektif. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus yang hanya pada satu desa, sehingga rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah untuk mengeksplorasi perbandingan antara desa-desa lain dalam pelestarian budaya dan peran pemerintah desa.

DAFTAR REFERENSI

- Darmayanti, N. (2013). Metodologi penelitian pendidikan. Jakarta: Gramedia.
- Herawati, H., Endah, K., & Garis, R. R. (2022). Peran kepala desa dalam menjaga budaya lokal di Dusun Karangpete Desa Kalijati Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran.
- Koentjaraningrat, & Triwardani. (2010). Pengantar ilmu antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, L. J. (2007). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, T. (2006). Dimensi-dimensi pemerintahan desa. Jakarta: Bina Aksara.
- Nuraeni, & Alfian. (2012). Studi budaya di Indonesia. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Nurul Iman, N. (2016). Budaya dan identitas bangsa. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Rahayu, E. L., Nurwanda, A., & Budiawan, A. (2025). Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam sosialisasi identitas kependudukan digital di Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen*, 2(3), 724-736.
- Siagian, S. P. (2017). *Administrasi pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (2015). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soetomo. (2006). *Strategi-strategi pembangunan masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- Yuliani, T. (2021). Pemberdayaan masyarakat desa dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. Bandung: Alfabeta.
- Zainuddin, A., & Pratama, H. (2020). Implementasi kebijakan pembangunan berbasis kearifan lokal di desa-desa Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 9(2), 155-168. <https://doi.org/10.24198/jish.v9i2.27845>
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan masyarakat: Wacana dan praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media.